

PARADOKS NORMA SOSIAL DALAM KEPATUHAN SERTIFIKASI ISPO: BUKTI DARI AKUNTANSI KEPERILAKUAN

Antonius Grivaldi Sondakh^{*}
Lili Safrida[†]

ABSTRACT

This study challenges the foundational assumption in behavioral accounting that social norms promote compliance. It investigates a paradoxical possibility: under certain conditions, social norms may inhibit compliance. Drawing on the theory of planned behavior, this research examines how social norms, conservation beliefs, and self-efficacy influence smallholders' intention to adopt Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) certification. Survey data from 143 smallholders in South Kalimantan were analyzed using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). The findings reveal a social norms paradox: perceived community pressure negatively influences certification intention. Conservation beliefs also exhibit a negative effect, indicating value-control misalignment when certification is perceived as disconnected from substantive outcomes. In contrast, self-efficacy positively influences intention. This study identifies boundary conditions for subjective norms and introduces the concept of value-control misalignment to explain resistance among environmentally committed actors.

Keywords: Social Norms Paradox, Behavioral Accounting, Theory of Planned Behavior, ISPO Certification, Value-Control Misalignment

1. PENDAHULUAN

Apa yang terjadi ketika tekanan sosial yang seharusnya mendorong kepatuhan justru menjadi penghambat? Asumsi fundamental dalam akuntansi keperilakuan menyatakan bahwa norma sosial mendorong kepatuhan terhadap aturan dan regulasi. Namun, penelitian terkini menunjukkan bahwa kontrol normatif dapat menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan. Colling dan Ceulemans (2023) mengidentifikasi bahwa tekanan sosial dapat lebih memicu resistensi daripada kepatuhan. Norma sosial tidak selalu menyelaraskan perilaku dengan harapan institusional. Hubungan antara budaya organisasi dan sistem kontrol juga tidak seragam. Einhorn *et al.* (2024) menemukan bahwa asosiasi antara tipe budaya dan

^{*} Universitas Lambung Mangkurat, Email agsondakh@ulm.ac.id (penulis korespondensi)

[†] Universitas Lambung Mangkurat, Email lilisafrika@ulm.ac.id

mekanisme kontrol berbeda antara sistem kontrol manajemen umum dan sistem kontrol manajemen lingkungan.

Penelitian ini mengkaji kemungkinan paradoks. Dalam kondisi tertentu, norma sosial justru dapat menghambat kepatuhan. Paradoks ini relevan ketika mempertimbangkan rezim sertifikasi regulasi. Dalam konteks tersebut, kontrol dirancang oleh otoritas yang jauh dengan keterlibatan lokal yang terbatas (Johnstone, 2022; Powers & Altman, 2023). Pemahaman tentang kondisi batas ini penting untuk merancang kebijakan sertifikasi yang efektif.

Penelitian ini berkontribusi pada tiga hal. Pertama, memperluas penerapan *Theory of planned behavior* ke konteks sertifikasi keberlanjutan, sebuah area yang selama ini jarang dieksplorasi dalam literatur akuntansi berperilaku. Kedua, mengidentifikasi kondisi batas bagi pengaruh norma subjektif dengan menunjukkan bahwa efek normatif dapat terbalik menjadi negatif ketika regulasi dianggap dipaksakan dari luar (paradoks norma sosial). Ketiga, memperkenalkan konsep ketidakselarasan nilai-kontrol (*value-control misalignment*) sebagai lensa interpretif untuk memahami resistensi di kalangan aktor yang berkomitmen lingkungan tinggi.

Skema sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) menyediakan konteks kritis untuk menelaah dinamika ini. Meskipun bersifat wajib, adopsi di kalangan petani swadaya tetap sangat rendah. Data terbaru menunjukkan bahwa hingga 2024, baru 0,3 persen dari total 6,94 juta hektar lahan kelapa sawit yang dikelola petani swadaya bersertifikat ISPO. Sebuah kesenjangan ekstrem jika dibandingkan dengan perkebunan korporasi yang telah mencapai tingkat sertifikasi 63 persen (Erdi *et al.*, 2026).

Sebagai gambaran betapa dalamnya kesenjangan struktural ini, studi kasus di Kabupaten Siak, Riau, menunjukkan bahwa bahkan dalam skenario paling optimistis sekalipun, target sertifikasi penuh akan membutuhkan waktu sekitar 95 tahun (Erdi *et al.*, 2026). Kegagalan mencapai target akhirnya mendorong pemerintah memperpanjang tenggat sertifikasi petani swadaya hingga Maret 2029 melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025.

Watts *et al.* (2021) juga mencatat petani swadaya mengelola sekitar 40 persen luas lahan kelapa sawit Indonesia. Petani dalam kondisi struktural serupa menunjukkan respons yang berbeda terhadap sertifikasi. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor psikologis dan sosial berperan penting.

Pramudya *et al.* (2022) mencatat bahwa insentif bagi petani swadaya dalam sertifikasi wajib masih menjadi tantangan utama. Penelitian sebelumnya tentang ISPO lebih menekankan hambatan struktural dan ekonomi. Hambatan tersebut meliputi biaya sertifikasi, akses terbatas ke kredit, dukungan institusional yang lemah, dan layanan penyuluhan yang tidak memadai (Jelsma *et al.*, 2019; Pramudya *et al.*, 2022). Meskipun penting, kendala-kendala itu tidak sepenuhnya menjelaskan pola adopsi.

Riset akuntansi keperilakuan menunjukkan bahwa dimensi psikososial dapat membentuk respons aktor terhadap sistem kontrol. Merchant dan Otley (2020) menekankan pentingnya pemahaman kontekstual tentang mekanisme kontrol, terutama ketika kontrol dirancang melampaui batas organisasi. Colling dan Ceulemans (2023) memperkuat bahwa kontrol normatif dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Namun, aspek-aspek psikososial ini masih kurang dieksplorasi dalam konteks ISPO.

Theory of planned behavior (Ajzen, 1991) menyediakan kerangka untuk meneliti bagaimana faktor psikososial membentuk keputusan kepatuhan. Teori tersebut menyatakan bahwa niat perilaku adalah prediktor paling langsung dari perilaku aktual. Sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan berfungsi sebagai anteseden utamanya. Dalam konteks regulasi, penelitian terkini menunjukkan bahwa reaktansi yang dipicu oleh proses administratif dapat meningkatkan niat ketidakpatuhan (Falsetta & Spilker, 2026). Temuan itu memperkuat relevansi *theory of planned behavior* untuk memahami kepatuhan dalam pengaturan yang diawasi otoritas.

Penelitian ini mengintegrasikan akuntansi keperilakuan dengan kajian sistem pengendalian manajemen. Dengan menelaah respons petani terhadap sertifikasi ISPO sebagai mekanisme kontrol regulasi, penelitian ini memperluas

teori *management control systems* melampaui batas organisasi (Merchant & Otley, 2020). Fokus tetap pada dimensi perilaku dari keputusan kepatuhan.

Penelitian ini mengajukan tiga pertanyaan. Pertama, bagaimana norma sosial memengaruhi niat petani mengadopsi sertifikasi ISPO? Kedua, bagaimana keyakinan konservasi dan efikasi diri memengaruhi niat tersebut? Ketiga, bagaimana niat diterjemahkan menjadi keterlibatan kepatuhan aktual?

2. TINJAUAN LITERATUR DAN HIPOTESIS

Theory of Planned Behavior

Theory of planned behavior (TPB) dikembangkan oleh Ajzen (1991). Teori ini menjelaskan bahwa niat perilaku adalah prediktor paling langsung dari perilaku aktual. Niat dibentuk oleh tiga anteseden utama: sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan. Kerangka ini menekankan bahwa tindakan manusia bersifat intensional dan beralasan.

Dalam konteks akuntansi, TPB telah banyak digunakan untuk memahami keputusan kepatuhan. Bobek *et al.* (2007) menunjukkan bahwa norma subjektif memengaruhi niat kepatuhan pajak lintas negara. Studi mereka mengungkapkan bahwa norma pribadi dan norma sosial berkontribusi secara independen terhadap niat kepatuhan.

Perkembangan terkini memperluas cakupan TPB. Black *et al.* (2022) mengintegrasikan konsep moral *disengagement* ke dalam kerangka TPB. Mereka menemukan bahwa *disengagement* moral menjadi anteseden bagi sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan. Temuan ini menunjukkan bahwa faktor-faktor psikologis yang lebih dalam dapat memengaruhi proses pembentukan niat.

Penelitian lain dalam konteks pertanian juga menguatkan relevansi TPB. Hendrawan dan Musshoff (2024) menerapkan TPB untuk memprediksi niat petani mengadopsi agroforestri kelapa sawit. Mereka menemukan bahwa sikap dan kontrol perilaku yang dirasakan menjadi prediktor signifikan. Temuan ini memperkuat bahwa TPB dapat menjelaskan keputusan adopsi dalam konteks pertanian.

Dalam konteks regulasi, Falsetta dan Spilker (2026) menunjukkan bahwa reaktansi psikologis dapat memengaruhi proses pembentukan niat. Studi eksperimental mereka membuktikan bahwa ancaman terhadap kebebasan dapat memicu resistensi. Meskipun demikian, penerapan TPB dalam konteks sertifikasi keberlanjutan yang bersifat wajib, khususnya yang melibatkan petani kecil di negara berkembang, masih sangat terbatas dalam literatur akuntansi keperilakuan. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menerapkan TPB untuk memahami keputusan petani swadaya dalam mengadopsi sertifikasi ISPO.

Norma Sosial dan Niat Kepatuhan

Norma sosial dalam TPB didefinisikan sebagai tekanan sosial yang dirasakan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku (Ajzen, 1991). Asumsi implisit dalam literatur adalah bahwa norma sosial secara seragam meningkatkan keselarasan perilaku. Norma menyediakan informasi sosial, memodelkan perilaku yang diinginkan, dan menciptakan harapan kolektif.

Namun, penelitian terkini menunjukkan bahwa kontrol normatif dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Colling dan Ceulemans (2023) mengidentifikasi bahwa tekanan sosial lebih dapat memicu resistensi daripada kepatuhan. Efek samping operasional dan tekanan psikologis menjadi konsekuensi yang mungkin muncul dari kontrol normatif. Temuan ini selaras dengan studi Einhorn *et al.* (2024). Mereka menemukan bahwa hubungan antara budaya organisasi dan sistem kontrol tidak seragam. Asosiasi antara tipe budaya dan mekanisme kontrol berbeda antara sistem kontrol manajemen umum dan sistem kontrol manajemen lingkungan. Hal tersebut menunjukkan bahwa efek normatif bergantung pada konteks.

Dalam konteks ISPO, beberapa faktor dapat membalikkan mekanisme normatif. Persyaratan sertifikasi dirancang secara terpusat oleh otoritas regulasi dengan keterlibatan lokal terbatas (Johnstone, 2022). Petani menghadapi persyaratan ini sebagai tuntutan dari luar, bukan sebagai harapan yang muncul dari komunitas.

Teori reaktansi psikologis menjelaskan mekanisme ini. Brehm (1966) menyatakan bahwa ketika individu merasakan ancaman terhadap kebebasan

perilaku, mereka mengalami keadaan motivasional untuk memulihkan otonomi yang terancam. Powers dan Altman (2023) menunjukkan bahwa ancaman koersif gagal justru karena reaktansi melebihi perhitungan biaya-manfaat. Penelitian Falsetta dan Spilker (2026) memperkuat temuan ini. Mereka secara eksperimental membuktikan bahwa reaktansi yang dipicu oleh inefisiensi administratif meningkatkan niat ketidakpatuhan. Efek ini lebih kuat ketika ancaman dirasakan sebagai satu-satunya paksaan. Berdasarkan argumentasi tersebut, hipotesis pertama diajukan.

H-1: Norma sosial berpengaruh negatif pada niat mengadopsi sertifikasi ISPO.

Keyakinan Konservasi dan Niat Kepatuhan

Keyakinan konservasi mencerminkan nilai-nilai lingkungan petani dan komitmen mereka terhadap praktik berkelanjutan. Dalam riset akuntansi, nilai dan orientasi etis terbukti memengaruhi penilaian dan keputusan. Dalam konteks persyaratan konservasi dianggap membebani. Keyakinan tersebut secara paradoks dapat menghambat adopsi. Ketika petani dengan nilai lingkungan kuat memandang prosedur sertifikasi sebagai birokratis atau terputus dari hasil lingkungan substantif, mereka mengalami ketidakselarasan nilai-kontrol (*value-control misalignment*).

Penelitian ini memperkenalkan konsep ketidakselarasan nilai-kontrol untuk menjelaskan fenomena tersebut. Ketidakselarasan nilai-kontrol didefinisikan sebagai kondisi dengan nilai-nilai internal aktor, dalam hal ini komitmen lingkungan yang kuat, bertentangan secara perseptual dengan karakteristik sistem kontrol eksternal. Ketika sistem kontrol dianggap birokratis, tidak autentik, atau terputus dari hasil substantif yang dihargai oleh aktor, nilai-nilai yang seharusnya mendorong perilaku prolingkungan justru mengintensifkan evaluasi kritis dan resistensi terhadap sistem tersebut. Dalam konteks ISPO, petani dengan nilai konservasi kuat memandang prosedur sertifikasi sebagai birokratis atau terputus dari hasil lingkungan substantif sehingga mereka mengalami ketidakselarasan nilai-kontrol.

Alih-alih memotivasi adopsi, nilai konservasi yang kuat dapat mengintensifkan evaluasi kritis terhadap sistem sertifikasi. Penelitian Putri *et al.*

(2022) tentang tata kelola kelapa sawit di Indonesia menunjukkan bahwa skeptisisme terhadap skema sertifikasi dapat muncul ketika implementasi dianggap tidak selaras dengan praktik lokal. Glasbergen (2018) menemukan bahwa petani yang sudah menganggap diri mereka berkelanjutan cenderung menolak intervensi formal. Mereka memandang sertifikasi tidak perlu atau berpotensi mengancam praktik yang sudah mapan. Temuan itu menunjukkan bahwa nilai lingkungan yang kuat tidak selalu mendorong adopsi sertifikasi.

Mengacu pada teori institusional, penelitian Colling dan Ceulemans (2023) menunjukkan bahwa ketika individu memiliki nilai yang berbeda dari mekanisme institusional, disidentifikasi dan resistensi muncul. Ketika ketidakselarasan terjadi, nilai-nilai mereka dapat mengintensifkan resistensi. Berdasarkan argumentasi tersebut, hipotesis kedua diajukan.

H-2: Keyakinan konservasi berpengaruh negatif pada niat mengadopsi sertifikasi ISPO.

Efikasi Diri dan Niat Kepatuhan

Efikasi diri mengacu pada keyakinan individu tentang kapabilitas mereka untuk menjalankan tindakan yang diperlukan. Bandura (1997) mendefinisikan efikasi diri sebagai prediktor perilaku yang kuat. Ini memengaruhi apakah individu mengambil tugas menantang, seberapa besar usaha yang dikeluarkan, dan seberapa gigih mereka mengejar tujuan. Dalam konteks sertifikasi, efikasi diri menjadi kunci karena kompleksitas persyaratan. Sertifikasi ISPO membutuhkan petani menavigasi prosedur administratif, memelihara catatan, memahami standar, dan melakukan interaksi dengan auditor. Petani yang percaya diri lebih mungkin membentuk niat adopsi kuat.

Paper Hall (2016), yang mengulas teori psikologi dalam riset akuntansi manajemen, menegaskan pentingnya persepsi kontrol dalam membentuk respons terhadap sistem kontrol. Merchant dan Otley (2020) juga menekankan bahwa pemahaman tentang kapabilitas aktor menjadi penting ketika sistem kontrol dirancang melampaui batas organisasi. Ketika merasa mampu, petani menafsirkan tuntutan kontrol sebagai tantangan, bukan ancaman. Mekanisme *enabling* ini dijelaskan oleh Tessier dan Otley (2012) dalam pengembangan kerangka *levers of*

control. Mekanisme ini mengurangi kecemasan, meningkatkan keterlibatan, dan mempertahankan motivasi. Penelitian Hendrawan dan Musshoff (2024) dalam konteks adopsi agroforestri memperkuat temuan ini. Mereka menemukan bahwa kontrol perilaku yang dirasakan menjadi prediktor signifikan bagi niat adopsi. Hal itu menunjukkan bahwa efikasi diri memiliki peran penting dalam keputusan adopsi teknologi pertanian. Berdasarkan argumentasi tersebut, hipotesis ketiga diajukan.

H-3: Efikasi diri berpengaruh positif pada niat mengadopsi sertifikasi ISPO.

Niat dan Keterlibatan Kepatuhan

Niat perilaku adalah inti TPB sebagai anteseden langsung perilaku aktual (Ajzen, 1991). Niat menangkap faktor motivasional dan menunjukkan seberapa keras individu bersedia mencoba. Studi dalam akuntansi dan manajemen menunjukkan niat secara andal diterjemahkan ke tindakan. Hall (2016) menegaskan bahwa dalam konteks sistem pengendalian, niat menjadi jembatan antara evaluasi kognitif dan tindakan aktual. Merchant dan Otley (2020) juga menekankan bahwa ketika individu memiliki agensi atas keputusan mereka, niat menjadi prediktor yang kuat.

Dalam konteks ISPO, niat mengadopsi sertifikasi diharapkan membentuk perilaku aktual. Perilaku ini mencakup mencari informasi, menghadiri pelatihan, berkonsultasi dengan petugas penyuluhan, atau memulai proses registrasi. Tindakan tersebut merupakan keterlibatan kepatuhan (*compliance engagement*). Watts *et al.* (2021) mendokumentasikan bahwa hambatan sertifikasi ISPO sebagian besar bersifat struktural dan ekonomi, tetapi petani yang menunjukkan orientasi kepatuhan yang lebih kuat cenderung lebih terlibat dalam proses awal sertifikasi. Jelsma *et al.* (2019) juga menemukan bahwa niat berkorelasi dengan implementasi praktik pertanian yang baik. Berdasarkan argumentasi tersebut, hipotesis keempat diajukan.

H-4: Niat mengadopsi sertifikasi ISPO berpengaruh positif pada keterlibatan kepatuhan.

3. METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatori. Tujuannya adalah menguji pengaruh faktor psikososial terhadap niat dan keterlibatan kepatuhan petani swadaya dalam sertifikasi ISPO. Pendekatan ini sesuai karena penelitian bertujuan menguji hipotesis dan menilai hubungan struktural antarkonstruksi laten (Hall, 2016).

Analisis data menggunakan *Partial Least Squares Structural Equation Modeling* (PLS-SEM). Metode PLS-SEM dipilih karena tiga alasan. Pertama, PLS-SEM memprioritaskan prediksi konstruk target, yaitu niat dan keterlibatan kepatuhan. Kedua, model penelitian menggabungkan beberapa konstruk antecedent dan mekanisme mediasi. Ketiga, PLS-SEM cocok untuk ukuran sampel moderat dan tidak memerlukan asumsi distribusi yang ketat (Hair *et al.*, 2019).

Konteks dan Sampel Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Wilayah ini dipilih karena memiliki luas perkebunan kelapa sawit petani swadaya yang signifikan. Tingkat sertifikasi ISPO di daerah ini juga relatif rendah (Putri *et al.*, 2022). Petani swadaya adalah petani yang beroperasi di luar struktur korporasi. Mereka menjadi populasi teoretis karena menghadapi kontrol regulasi tanpa pengaruh hubungan kerja organisasi.

Meskipun sertifikasi ISPO bersifat wajib, penegakan di kalangan petani swadaya masih terbatas. Hal ini disebabkan kapasitas institusional yang lemah, kurangnya infrastruktur pemantauan, dan sifat operasi petani yang tersebar (Watts *et al.*, 2021). Akibatnya, adopsi bersifat diskresioner di tingkat petani. Niat menjadi prediktor keterlibatan yang bermakna.

Kriteria sampel ditetapkan sebagai berikut. Pertama, petani harus mengelola setidaknya dua hektar perkebunan kelapa sawit. Kedua, mereka belum memiliki sertifikasi ISPO. Kriteria ini memastikan responden relevan dengan konteks keputusan adopsi. Pengambilan sampel dilakukan secara purposif melalui kantor dinas pertanian kabupaten dan jaringan kelompok tani. Jumlah responden

yang berhasil dikumpulkan adalah 143 petani. Analisis daya menggunakan G*Power dengan empat prediktor, ukuran efek sedang ($f^2=0,15$), $\alpha=0,05$, dan daya=0,80 menunjukkan sampel minimum yang diperlukan adalah 85. Sampel yang dicapai melebihi ambang batas sehingga daya statistik memadai.

Karakteristik sampel menunjukkan rata-rata usia 44,3 tahun dan rata-rata pengalaman bertani 11,7 tahun. Sebanyak 62,2 persen responden adalah anggota kelompok tani. Sebanyak 30,1 persen memiliki pelatihan keberlanjutan sebelumnya. Tingkat pendidikan tergolong sederhana, sekitar dua pertiga menyelesaikan SMP ke bawah. Profil ini konsisten dengan karakteristik petani swadaya di wilayah tersebut.

Pengumpulan Data

Data primer dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur pada Mei hingga Juli 2025. Pendekatan campuran digunakan dalam administrasi kuesioner. Wawancara tatap muka dilakukan untuk 68,5 persen responden. Distribusi daring melalui jaringan kelompok tani dilakukan untuk 31,5 persen responden. Wawancara tatap muka memastikan aksesibilitas bagi responden dengan literasi terbatas.

Kuesioner terdiri atas tiga bagian. Bagian pertama mengungkap karakteristik demografi: usia, tingkat pendidikan, pengalaman bertani, dan luas perkebunan. Bagian kedua mengukur faktor psikososial: norma sosial (tiga item), keyakinan konservasi (tiga item), dan efikasi diri (tiga item). Bagian ketiga mengukur hasil perilaku: niat (tiga item) dan keterlibatan kepatuhan (lima item).

Semua item diukur dengan skala likert lima poin, mulai dari 1 (sangat tidak setuju) hingga 5 (sangat setuju). Instrumen pengukuran diadaptasi dari penelitian sebelumnya. Item norma sosial diadaptasi dari Ajzen (1991). Item keyakinan konservasi diadaptasi dari skala psikologi lingkungan yang mapan. Item efikasi diri dikembangkan mengikuti pedoman Bandura (1997). Item niat diadaptasi dari Ajzen (1991).

Item keterlibatan kepatuhan dikembangkan melalui tiga tahap: tinjauan dokumen panduan ISPO, konsultasi dengan praktisi dan petugas penyuluhan, serta uji coba dengan petani. Item keterlibatan kepatuhan dikembangkan dengan mengacu pada dimensi keperilakuan kepatuhan dalam literatur akuntansi

keperilakuan (Hall, 2016; Merchant & Otley, 2020). Validitas konten dinilai melalui tinjauan ahli. Dua akademisi spesialis akuntansi keperilakuan dan satu praktisi ISPO dilibatkan. Uji coba dilakukan pada 15 petani swadaya untuk mengevaluasi kejelasan dan relevansi kontekstual. Penyesuaian minor dilakukan berdasarkan umpan balik.

Penanganan Data Hilang

Penyaringan data awal menunjukkan bahwa nilai yang hilang (*missing values*) kurang dari 2 persen dari total seluruh respons. Nilai yang hilang ini bersifat acak (*missing completely at random*) sebagaimana dikonfirmasi dengan uji Little yang menunjukkan nilai chi-kuadrat tidak signifikan (p lebih besar dari 0,05). Untuk menangani nilai yang hilang, digunakan metode *mean substitution* (penggantian dengan nilai rata-rata item). Keputusan ini didasarkan pada tiga pertimbangan: (1) proporsi nilai yang hilang sangat kecil (kurang dari 2 persen) sehingga dampak potensial bias terhadap estimasi parameter minimal; (2) metode ini direkomendasikan untuk situasi dengan *missing data* dalam jumlah kecil dan bersifat acak (Hair *et al.*, 2019); (3) analisis sensitivitas yang membandingkan hasil sebelum dan sesudah imputasi menunjukkan tidak adanya perubahan signifikan pada pola korelasi antarkonstruk.

Penilaian Model Pengukuran

Penilaian awal model pengukuran melibatkan 19 indikator: tiga indikator per konstruk untuk norma sosial, keyakinan konservasi, efikasi diri, dan niat, serta lima indikator untuk keterlibatan kepatuhan. Beberapa indikator keterlibatan kepatuhan memiliki *outer loading* di bawah 0,70. Indikator-indikator tersebut dihilangkan secara iteratif, satu per satu dimulai dari indikator dengan *loading* terendah. Proses itu menghasilkan penghapusan tiga indikator dari konstruk keterlibatan kepatuhan. Model pengukuran akhir terdiri atas 16 indikator pada 5 konstruk. Penghapusan indikator ini meningkatkan *Average Variance Extracted* (AVE) untuk keterlibatan kepatuhan dari 0,44 menjadi 0,67.

Sebelum mengevaluasi hubungan struktural, model pengukuran dinilai untuk memastikan validitas dan reliabilitas konstruk. Reliabilitas indikator

diperiksa melalui *outer loadings*. Ambang batas 0,70 digunakan sebagai tolok ukur (Hair *et al.*, 2019). Reliabilitas konsistensi internal dievaluasi dengan *composite reliability*. Ambang batas minimum 0,70 diterapkan. Validitas konvergen dinilai dengan *Average Variance Extracted* (AVE). Nilai di atas 0,50 menunjukkan validitas konvergen yang dapat diterima. Validitas diskriminan dievaluasi menggunakan kriteria *Fornell-Larcker* dan rasio *Heterotrait-Monotrait* (HTMT) (Henseler *et al.*, 2015).

Bias Metode Umum

Karena data dikumpulkan melalui kuesioner *self-report* dalam satu waktu (*cross-sectional*), terdapat potensi terjadinya *common method bias* (CMB). Untuk mendeteksi dan menilai keparahan CMB, dilakukan dua prosedur. Pertama, uji faktor tunggal Harman (*Harman's single-factor test*). Seluruh item indikator dimasukkan ke dalam analisis faktor tanpa rotasi. Hasil menunjukkan bahwa faktor pertama hanya menjelaskan 29,4 persen dari total varians, jauh di bawah ambang batas 50 persen sesuai yang direkomendasikan (Podsakoff *et al.*, 2003).

Kedua, penilaian kolinieritas penuh (*full collinearity test*). Nilai *variance inflation factor* (VIF) untuk semua konstruk dihitung dengan meregresikan setiap konstruk terhadap konstruk lainnya. Seluruh nilai VIF berada di bawah 3,3, dengan rentang 1,21 hingga 2,87. Menurut Kock (2015), nilai VIF di bawah 3,3 mengindikasikan bahwa CMB bukan ancaman signifikan terhadap validitas interpretasi model.

Pada tahap desain, prosedur pencegahan CMB juga diterapkan. Urutan item dalam kuesioner diacak untuk meminimalkan efek urutan (*order effects*), dan konstruk prediktor (norma sosial, keyakinan konservasi, efikasi diri) dipisahkan dari konstruk *outcome* (niat dan keterlibatan kepatuhan) dalam bagian kuesioner yang berbeda sebagai tindakan pencegahan prosedural (Podsakoff *et al.*, 2003).

Meskipun uji faktor tunggal Harman memiliki keterbatasan sebagai satu-satunya prosedur deteksi CMB (Podsakoff *et al.*, 2003), kombinasinya dengan *full collinearity* VIF memberikan triangulasi yang lebih *robust* terhadap ancaman bias ini. Berdasarkan kedua pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *common method bias* tidak menjadi masalah serius dalam penelitian ini.

Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan SmartPLS 4 mengikuti pendekatan dua tahap (Hair *et al.*, 2019). Tahap pertama, menilai model pengukuran. Tahap kedua, mengevaluasi model struktural untuk menguji hipotesis. Penilaian model struktural meliputi koefisien jalur, t-statistik, dan *p-value*. *Bootstrapping* dengan 5.000 resampel digunakan. Daya penjas model dinilai dengan koefisien determinasi (R^2). Relevansi prediktif diperiksa dengan Q^2 *Stone-Geisser* melalui prosedur *blindfolding*. Ukuran efek (f^2) dihitung untuk mengevaluasi kontribusi relatif setiap konstruk prediktor.

Bias metode umum dinilai dengan uji faktor tunggal Harman dan penilaian kolinieritas penuh. Nilai VIF di bawah 3,3 menunjukkan bias metode umum bukan ancaman signifikan. Dengan demikian, data penelitian ini layak untuk dianalisis lebih lanjut.

Pertimbangan Etis

Penelitian ini melibatkan partisipan manusia. Pertimbangan etis ditangani dengan hati-hati. Partisipasi bersifat sukarela. Responden diberi informasi tentang tujuan penelitian sebelum mengisi kuesioner. *Informed consent* diperoleh secara lisan untuk survei tatap muka.

Untuk respons daring, pernyataan persetujuan digunakan. Responden dijamin bahwa jawaban mereka rahasia dan hanya digunakan untuk tujuan akademis. Tidak ada pengidentifikasi pribadi yang direkam. Data disimpan aman dan hanya diakses oleh penulis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pendahuluan

Penyaringan data menunjukkan nilai yang hilang kurang dari dua persen. Nilai yang hilang ditangani dengan substitusi rata-rata (Hair *et al.*, 2019). Tidak ada

outlier univariat dengan *z-scores* lebih besar dari ± 3 . Tidak ada *outlier multivariat* dengan jarak Mahalanobis pada $p < 0,001$. Nilai *skewness* berkisar -0,87 hingga 0,62. Nilai kurtosis berkisar -1,08 hingga 0,92. Nilai-nilai ini berada dalam kisaran yang dapat diterima untuk PLS-SEM.

Statistik deskriptif menunjukkan keyakinan konservasi memiliki rata-rata tertinggi, berkisar 3,98 hingga 4,12, artinya ada nilai lingkungan yang kuat di kalangan responden. Norma sosial menunjukkan rata-rata moderat, berkisar 3,24 hingga 3,56. Hal itu menunjukkan kesadaran akan harapan masyarakat mengenai sertifikasi.

Rata-rata efikasi diri berkisar 2,89 hingga 3,45. Hal itu menunjukkan kepercayaan diri yang moderat dalam memenuhi persyaratan sertifikasi. Rata-rata niat berkisar 2,67 hingga 3,12 yang mencerminkan niat sertifikasi yang sederhana. Item keterlibatan kepatuhan menunjukkan variasi substansial. Pencarian informasi (rata-rata=2,87) lebih umum daripada persiapan dokumen (rata-rata=2,34). Hal itu mencerminkan keterlibatan sertifikasi tahap awal.

Bias metode umum dinilai dengan uji faktor tunggal Harman. Uji menunjukkan faktor pertama menyumbang 29,4 persen dari total varians. Nilai ini berada di bawah ambang batas 50 persen. Penilaian kolinieritas penuh menunjukkan semua VIF di bawah 3,3. Hal itu mengindikasikan bias metode umum bukan ancaman signifikan.

Penilaian Model Pengukuran

Penilaian awal menunjukkan beberapa indikator keterlibatan kepatuhan memiliki *loading* di bawah 0,70. Indikator-indikator tersebut dihilangkan secara iteratif. Proses ini meningkatkan AVE untuk keterlibatan kepatuhan dari 0,44 menjadi 0,67. Model pengukuran akhir terdiri atas 16 indikator pada 5 konstruk.

Tabel 1 menyajikan properti pengukuran akhir. Semua konstruk menunjukkan reliabilitas memadai. *Composite reliability* berkisar 0,79 hingga 0,94. Nilai-nilai ini melebihi kriteria 0,70. Validitas konvergen terpenuhi karena semua nilai AVE melebihi 0,50. AVE efikasi diri sebesar 0,51. Meskipun moderat, masih di atas ambang batas. Hal itu menunjukkan konstruk menjelaskan lebih dari setengah varians indikatornya (Hair *et al.*, 2019).

Tabel 1

Penilaian Model Pengukuran

Konstruk	CR	AVE	1	2	3	4	5
Norma Sosial	0,89	0,67	0,82				
Keyakinan Konservasi	0,91	0,72	0,18	0,85			
Efikasi Diri	0,79	0,51	0,23	0,20	0,71		
Niat	0,94	0,81	- 0,09	- 0,14	0,36	0,90	
Keterlibatan Kepatuhan	0,82	0,67	- 0,06	- 0,11	0,34	0,84	0,82

Catatan: Nilai *diagonal* (cetak tebal) adalah akar kuadrat AVE. Nilai *off diagonal* adalah korelasi antar konstruk.

Validitas diskriminan dinilai dengan kriteria Fornell-Larcker dan rasio HTMT. Korelasi terkuat adalah antara niat dan keterlibatan kepatuhan ($r = 0,84$). Nilai HTMT antara niat dan keterlibatan kepatuhan adalah 0,89. Nilai ini berada di bawah ambang batas liberal 0,90 (Henseler *et al.*, 2015). Mengingat niat adalah determinan proksimal keterlibatan dalam TPB, nilai ini dapat diterima. Semua pasangan konstruk lainnya memenuhi kedua kriteria validitas diskriminan. Pemeriksaan *cross-loading* mengonfirmasi semua indikator memiliki *loading* tertinggi pada konstruk yang dimaksud. Penilaian kolinieritas menunjukkan semua VIF di bawah 1,40, jauh di bawah ambang batas 5.

Hasil Model Struktural

Tiga temuan utama penelitian ini layak mendapat perhatian khusus. Pertama, dan ini merupakan temuan paling sentral yang menantang asumsi dasar akuntansi keperilakuan, norma sosial justru berpengaruh negatif pada niat sertifikasi. Kedua, keyakinan konservasi yang kuat juga berkorelasi negatif dengan niat, sebuah temuan yang tampak paradoks, tetapi dapat dijelaskan melalui konsep *value-*

control misalignment. Ketiga, sebagai kontras, efikasi diri menunjukkan pengaruh positif yang *robust*.

Tabel 2 menyajikan hasil pengujian hipotesis. Model menjelaskan 28 persen varians dalam niat ($R^2 = 0,28$). Model juga menjelaskan 70 persen varians dalam keterlibatan kepatuhan ($R^2 = 0,70$). Mengikuti Hair *et al.* (2019), R^2 untuk niat mewakili daya penjas moderat. R^2 untuk keterlibatan kepatuhan tergolong substansial. Nilai Q^2 Stone-Geisser sebesar 0,19 untuk niat dan 0,51 untuk keterlibatan kepatuhan mengonfirmasi relevansi prediktif.

Tabel 2

Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Jalur	β	t-value	p-value	f^2	Dukungan
H1	Norma Sosial → Niat	-0,24	2,38	0,017	0,06	Ya
H2	Keyakinan Konservasi → Niat	-0,22	2,51	0,012	0,05	Ya
H3	Efikasi Diri → Niat	0,35	4,12	<0,001	0,12	Ya
H4	Niat → Keterlibatan Kepatuhan	0,85	24,36	<0,001	2,48	Ya

Norma sosial menunjukkan efek negatif signifikan terhadap niat ($\beta = -0,24$, $p = 0,017$, $f^2 = 0,06$). Temuan ini mendukung H-1. Petani yang merasakan harapan komunitas lebih kuat melaporkan niat lebih rendah untuk mengadopsi sertifikasi ISPO. Temuan ini menantang asumsi konvensional bahwa norma sosial secara seragam mendorong kepatuhan (Bobek *et al.*, 2007; Einhorn *et al.*, 2024). Keyakinan konservasi juga menunjukkan efek negatif signifikan ($\beta = -0,22$, $p = 0,012$, $f^2 = 0,05$). Temuan ini mendukung H-2. Nilai lingkungan yang lebih kuat dikaitkan dengan niat sertifikasi yang lebih rendah. Temuan ini selaras dengan konsep ketidakselarasan nilai-kontrol.

Efikasi diri menunjukkan efek positif signifikan ($\beta = 0,35$, $p < 0,001$, $f^2 = 0,12$). Temuan ini mendukung H-3. Petani yang percaya diri dalam memenuhi persyaratan sertifikasi membentuk niat lebih kuat. Ukuran efek mendekati magnitudo sedang menunjukkan mekanisme *enabling* penting untuk kepatuhan regulasi. Niat secara kuat memprediksi keterlibatan kepatuhan ($\beta = 0,85$, $p < 0,001$, $f^2 = 2,48$). Temuan ini mendukung H-4 dan mengonfirmasi peran niat sebagai determinan proksimal perilaku dalam TPB (Ajzen, 1991).

Analisis Mediasi

Tabel 3 menyajikan hasil mediasi. Niat memediasi penuh efek norma sosial pada keterlibatan kepatuhan (efek tidak langsung = -0,20, $p < 0,05$, 95% CI [-0,36, -0,04]). Niat memediasi penuh efek keyakinan konservasi pada keterlibatan kepatuhan (efek tidak langsung = -0,19, $p < 0,05$, 95% CI [-0,34, -0,04]). Niat memediasi sebagian efek efikasi diri (efek tidak langsung = 0,29, $p < 0,01$, 95% CI [0,16, 0,42]).

Tabel 3

Hasil Analisis Mediasi

Jalur	Efek Langsung	Efek Tidak Langsung	Efek Total	Mediasi
SN → IN → CE	-0,01 (ns)	-0,20*	-0,21*	Penuh
CB → IN → CE	-0,02 (ns)	-0,19*	-0,21*	Penuh
SE → IN → CE	0,09 (ns)	0,29**	0,38**	Sebagian

*Catatan: ns = tidak signifikan; * $p < 0,05$; ** $p < 0,01$

Pola-pola ini mengonfirmasi niat sebagai mekanisme transmisi kunci. Niat menghubungkan evaluasi psikososial dengan tindakan kepatuhan (Ajzen, 1991). Mediasi penuh untuk mekanisme normatif menunjukkan bahwa norma sosial dan keyakinan konservasi memengaruhi keterlibatan sepenuhnya melalui keadaan motivasional. Ketika tekanan normatif dikaitkan dengan penurunan niat, keterlibatan juga menurun.

Pembahasan

Interpretasi Paradoks Norma Sosial

Temuan bahwa norma sosial secara negatif memengaruhi niat sertifikasi mengungkap paradoks. Hasil tersebut menantang asumsi bahwa norma sosial secara seragam mendorong kepatuhan (Bobek *et al.*, 2007; Einhorn *et al.*, 2024). Penjelasan terletak pada karakter khas konteks sertifikasi regulasi. ISPO adalah skema wajib yang dirancang terpusat oleh otoritas regulasi dengan keterlibatan lokal terbatas (Johnstone, 2022). Petani menghadapi persyaratan ini sebagai tuntutan dari luar. Tekanan normatif yang dikomunikasikan melalui kampanye dapat dialami sebagai ancaman terhadap otonomi, bukan informasi pendukung.

Pola ini konsisten dengan teori reaktansi psikologis (Brehm, 1966). Ketika merasakan ancaman terhadap kebebasan perilaku, individu mengalami keadaan motivasional untuk memulihkan otonomi. Powers dan Altman (2023) menunjukkan bahwa ancaman koersif gagal karena reaktansi melebihi perhitungan biaya-manfaat. Penelitian Falsetta dan Spilker (2026) memperkuat temuan ini. Mereka membuktikan bahwa reaktansi yang dipicu oleh proses administratif meningkatkan niat ketidakpatuhan. Dalam konteks ISPO, tekanan normatif yang dimaksudkan untuk mendorong kepatuhan dapat dikaitkan dengan reaktansi. Akibatnya, niat menurun, bukan meningkat.

Interpretasi ini selaras dengan kajian Colling dan Ceulemans (2023). Mereka mengidentifikasi bahwa kontrol normatif dapat menimbulkan efek samping operasional dan tekanan sosial yang memicu resistensi. Temuan ini menunjukkan bahwa dalam kondisi kontrol dianggap dipaksakan dari luar dan mengancam otonomi, mekanisme teoretis dapat terbalik. Paradoks norma sosial mewakili kondisi batas bagi pengaruh normatif dalam akuntansi berperilaku. Efek positif konvensional norma subjektif dalam TPB (Ajzen, 1991) mengasumsikan norma dialami sebagai informasi sosial. Ketika kondisi ini dilanggar dan norma dianggap mengancam otonomi, hubungan yang diprediksi dapat terbalik.

Paradoks Keyakinan Konservasi dan Ketidakselarasan Nilai-Kontrol

Pola paralel muncul untuk keyakinan konservasi. Petani dengan nilai lingkungan lebih kuat melaporkan niat sertifikasi lebih rendah. Temuan ini menantang asumsi bahwa sikap prolingkungan mendorong perilaku prolingkungan. Interpretasi yang diusulkan adalah ketidakselarasan nilai-kontrol. Petani dengan nilai konservasi kuat mengembangkan standar internal tentang tindakan lingkungan yang bermakna. Jika sertifikasi ISPO dianggap birokratis atau terputus dari hasil lingkungan substantif, mereka mungkin mengalami skeptisisme institusional. Nilai lingkungan yang kuat dapat mengintensifkan evaluasi kritis terhadap keaslian sistem sertifikasi.

Penelitian Putri *et al.* (2022) tentang tata kelola kelapa sawit Indonesia mendukung interpretasi ini. Skeptisisme terhadap skema sertifikasi dapat muncul ketika implementasi dianggap tidak selaras dengan praktik lokal. Glasbergen (2018) juga menemukan bahwa petani yang sudah menganggap diri berkelanjutan cenderung menolak intervensi formal. Mengacu pada teori institusional, Colling dan Ceulemans (2023) menunjukkan bahwa ketika individu memiliki nilai berbeda dari mekanisme institusional, resistensi muncul. Ketika ketidakselarasan terjadi, nilai-nilai mereka dapat mengintensifkan resistensi.

Peran Enabling Efikasi Diri

Berbeda dengan pola mekanisme normatif, efikasi diri menunjukkan pengaruh positif *robust* terhadap niat. Temuan ini konsisten dengan teori kognitif sosial (Bandura, 1997). Paper Hall (2016) menegaskan pentingnya persepsi kontrol. Merchant dan Otley (2020) juga menekankan bahwa pemahaman kapabilitas aktor penting dalam sistem kontrol.

Ketika merasa mampu mengelola persyaratan sertifikasi, petani menafsirkan tuntutan kontrol sebagai tantangan. Mekanisme *enabling* ini (Tessier & Otley, 2012) mengurangi kecemasan, meningkatkan keterlibatan, dan mempertahankan motivasi. Ukuran efek mendekati magnitudo sedang menunjukkan efikasi diri mungkin lebih penting untuk kepatuhan regulasi daripada tekanan normatif. Penelitian Hendrawan dan Musshoff (2024) memperkuat temuan ini. Mereka menemukan bahwa kontrol perilaku yang dirasakan menjadi prediktor signifikan bagi niat adopsi dalam konteks pertanian.

Kontribusi Teoretis

Penelitian ini memajukan literatur akuntansi keperilakuan dalam tiga cara. Pertama, penelitian ini mengidentifikasi kondisi batas bagi norma subjektif dalam TPB. Paradoks norma sosial menunjukkan bahwa asumsi efek normatif positif perlu direvisi dalam konteks aturan dianggap mengancam otonomi. Temuan ini memperluas temuan Bobek *et al.* (2007) dengan menunjukkan bahwa arah pengaruh normatif dapat bervariasi lintas konteks. Penelitian ini menunjukkan bahwa asumsi tersebut tidak berlaku universal: ketika regulasi dianggap dipaksakan dari luar dan mengancam otonomi, efek normatif dapat terbalik menjadi negatif. Paradoks norma sosial yang teridentifikasi dalam penelitian ini merepresentasikan kondisi batas bagi pengaruh normatif dalam akuntansi keperilakuan.

Kedua, penelitian ini memperkenalkan ketidakselarasan nilai-kontrol (*value-control misalignment*) sebagai lensa interpretif baru. Konsep ini menjelaskan resistensi di kalangan aktor yang berkomitmen lingkungan. Ketika mekanisme institusional dianggap terputus dari hasil substantif, nilai yang kuat dapat mengintensifkan skeptisisme, bukan kepatuhan.

Ketiga, penelitian ini memperluas penerapan TPB ke konteks sertifikasi keberlanjutan di negara berkembang. Teori ini telah banyak diterapkan dalam kepatuhan pajak dan adopsi teknologi. Penerapannya dalam sertifikasi keberlanjutan di konteks pertanian petani swadaya masih terbatas. Dengan menguji TPB di konteks ISPO, sebuah skema regulasi yang bersifat wajib, tetapi menghadapi tingkat kepatuhan yang sangat rendah (0,3 persen), penelitian ini menunjukkan relevansi dan keterbatasan teori tersebut dalam konteks yang unik.

Implikasi Praktis

Temuan penelitian ini memiliki implikasi penting bagi kebijakan ISPO di Indonesia, terutama mengingat target 100 persen sertifikasi yang telah diperpanjang hingga Maret 2029 melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025. Pertama, hindari pendekatan normatif yang memicu reaktansi. Kampanye yang menekankan tekanan sosial atau kewajiban moral

cenderung kontraproduktif. Strategi komunikasi sebaiknya mengadopsi pendekatan yang mendukung otonomi. Pendekatan ini mengakui hak petani untuk memutuskan, memberikan informasi jelas tanpa lapisan persuasif, dan mengakui kekhawatiran petani. Contoh konkretnya ialah alih-alih menggunakan slogan "Wajib ISPO 2029", kampanye dapat menggunakan pendekatan "Ini manfaat yang bisa Anda peroleh dari ISPO, dan ini dukungan yang tersedia bagi Anda."

Kedua, prioritas pada mekanisme *enabling*. Efek positif efikasi diri menunjukkan peningkatan kapasitas harus menjadi fokus utama program dukungan sertifikasi. Pelatihan perlu mencakup dokumentasi administratif, pemeliharaan catatan, dan prosedur sertifikasi. Contoh program konkret, lokakarya "Satu Hari bersama Dokumen ISPO" yang memandu petani mengisi formulir secara langsung serta pendampingan teknis berkelanjutan pascasertifikasi.

Ketiga, mengatasi ketidakselarasan nilai-kontrol penting bagi petani yang berkomitmen lingkungan. Demonstrasi hasil lingkungan nyata sangat penting bagi kelompok ini. Transparansi tentang dampak substantif sertifikasi dapat mengurangi skeptisisme. Melibatkan petani dalam penetapan standar dapat mengubah sertifikasi dari beban koersif menjadi alat berharga. Contoh konkret ialah membentuk "dewan petani untuk verifikasi dampak ISPO" yang terdiri atas petani dengan nilai konservasi tinggi untuk memantau dan melaporkan hasil lingkungan dari sertifikasi.

Keempat, pemodelan sebaya dapat efektif jika menghormati otonomi. Menampilkan kisah sukses petani sebaya yang telah menavigasi sertifikasi dapat lebih efektif. Kisah tersebut dibingkai sebagai "apa yang telah ditemukan orang lain mungkin", bukan "apa yang harus Anda lakukan".

Kelima, perhatian khusus pada aspek pembiayaan dan insentif. Pemerintah perlu mempertimbangkan insentif ekonomi langsung untuk petani yang bersertifikasi ISPO, misalnya melalui skema *revenue sharing* dari Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) atau akses prioritas ke program bantuan pemerintah.

Temuan ini memiliki implikasi spesifik bagi tata kelola kelapa sawit Indonesia. Kementerian Pertanian dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit perlu mempertimbangkan bahwa pendekatan normatif yang terlalu menekankan kewajiban moral dapat menjadi kontraproduktif. Program peningkatan kapasitas yang berfokus pada penguatan efikasi diri petani akan lebih efektif. Pelatihan administrasi dan pendampingan teknis merupakan contoh konkret program tersebut. Transparansi dampak lingkungan dari sertifikasi ISPO perlu ditingkatkan agar nilai-nilai konservasi yang kuat di kalangan petani tidak justru menjadi penghambat adopsi.

Keterbatasan dan Penelitian Mendatang

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Desain *cross-sectional* membatasi inferensi kausal. Penelitian longitudinal yang melacak petani melalui proses sertifikasi akan memberikan bukti yang lebih kuat. Konteks negara tunggal dan ukuran sampel moderat membatasi generalisasi. Replikasi lintas wilayah, skema sertifikasi, dan populasi petani diperlukan. Faktor budaya dapat memoderasi dinamika reaktansi. Budaya kolektifis Indonesia mungkin memperkuat sensitivitas terhadap tekanan normatif.

Reaktansi psikologis tidak diukur secara langsung. Penelitian mendatang harus menggunakan ukuran reaktansi yang divalidasi. Desain eksperimental serupa dengan Falsetta dan Spilker (2026) dapat memberikan bukti kausal yang lebih kuat. Ketidakselarasan nilai-kontrol juga tidak diukur langsung. Pengembangan ukuran yang divalidasi akan memungkinkan pengujian yang lebih tepat.

Korelasi kuat antara niat dan keterlibatan kepatuhan ($r = 0,84$) memerlukan pemisahan temporal dalam desain penelitian masa depan. Mengukur niat dan keterlibatan pada titik waktu berbeda akan memperkuat validitas diskriminan. Penelitian ini hanya berfokus pada empat faktor psikososial. Penelitian mendatang harus memasukkan variabel tambahan, seperti kepercayaan institusional, intensitas penegakan regulasi, dan dinamika pengaruh sebaya.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini mengamati pengaruh norma sosial, keyakinan konservasi, dan efikasi diri terhadap niat petani swadaya mengadopsi sertifikasi ISPO. Analisis data dari 143 petani di Kalimantan Selatan menggunakan PLS-SEM menghasilkan tiga temuan utama. *Pertama*, norma sosial berpengaruh negatif pada niat sertifikasi. Temuan ini menantang asumsi bahwa tekanan normatif secara seragam mendorong kepatuhan. *Kedua*, keyakinan konservasi juga berpengaruh negatif. Nilai lingkungan yang kuat dapat menghambat partisipasi ketika sertifikasi dianggap terputus dari hasil substantif. *Ketiga*, efikasi diri berpengaruh positif. Peran *enabling* dari kapabilitas yang dirasakan menjadi kunci. Niat secara kuat memprediksi keterlibatan kepatuhan menjelaskan 70 persen varians.

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi literatur akuntansi keperilakuan. *Pertama*, mengidentifikasi kondisi batas bagi norma subjektif dalam TPB. Efek normatif dapat terbalik ketika regulasi dianggap dipaksakan dari luar. *Kedua*, memperkenalkan ketidakselarasan nilai-kontrol untuk memahami resistensi aktor yang berkomitmen lingkungan. *Ketiga*, memperluas penerapan TPB ke konteks sertifikasi keberlanjutan.

Implikasi praktis bagi kebijakan ISPO meliputi beberapa hal. Intervensi harus menghindari pendekatan normatif yang memicu reaktansi. Program peningkatan kapasitas perlu memprioritaskan mekanisme *enabling* yang meningkatkan efikasi diri petani. Ketidakselarasan nilai-kontrol perlu diatasi dengan menunjukkan hasil lingkungan substantif. Pemodelan sebaya dapat dimanfaatkan dengan cara yang menghormati otonomi petani.

Penelitian ini memiliki keterbatasan. Desain *cross-sectional* membatasi inferensi kausal. Konteks negara tunggal membatasi generalisasi. Reaktansi psikologis tidak diukur langsung. Penelitian mendatang disarankan menggunakan desain longitudinal, mereplikasi lintas konteks, memasukkan ukuran langsung reaktansi dan ketidakselarasan nilai-kontrol, serta menyertakan variabel tambahan, seperti kepercayaan institusional.

Temuan ini mengungkap bahwa apa yang diharapkan mendorong kepatuhan, seperti norma sosial dan nilai lingkungan, secara paradoks dapat menghambat ketika sertifikasi dianggap dipaksakan dari luar dan terputus dari hasil substantif. Sistem yang dirancang untuk memberdayakan, bukan memaksa, dapat mencapai tujuan keberlanjutan sambil menghormati otonomi mereka yang ingin dipengaruhi. Dengan demikian, pendekatan kebijakan yang berpusat pada petani menjadi kunci keberhasilan sertifikasi ISPO pada masa mendatang.

DAFTAR RUJUKAN

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Bandura, A. (1997). *Self-efficacy - The exercise of control*. W.H. Freeman and Company.
- Black, E. L., Burton, F. G., & Cieslewicz, J. K. (2022). Improving ethics: Extending the theory of planned behavior to include moral disengagement. *Journal of Business Ethics*, 181(4), 945–978. <https://doi.org/10.1007/s10551-021-04896-z>
- Bobek, D. D., Roberts, R. W., & Sweeney, J. T. (2007). The social norms of tax compliance: Evidence from Australia, Singapore, and the United States. *Journal of Business Ethics*, 74(1), 49–64. <https://doi.org/10.1007/s10551-006-9219-x>
- Brehm, J. W. (1966). *A theory of psychological reactance*. Academic Press.
- Colling, L., & Ceulemans, K. (2023). A holistic view on the opportunities and threats of normative control: A literature review. *Journal of Management Control*, 34(3), 275–316. <https://doi.org/10.1007/s00187-023-00358-x>
- Einhorn, S., Fietz, B., Guenther, T. W., & Guenther, E. (2024). The relationship of organizational culture with management control systems and environmental management control systems. *Review of Managerial Science*, 18(8), 2321–2371. <https://doi.org/10.1007/s11846-023-00687-0>
- Erdi, Nawireja, I. K., Wibowo, L. R., Hutabarat, S., Utomo, M. M. B., Kurniasari, D. R., Pramudya, E. P., Hapsari, M., Fuad, Z., Kurniadi, R., Santosa, A., Nugraha, I., Hakim, I., Rizieq, R., Ramawati, & Satwiko, A. A. (2026). Acceleration of smallholder palm oil certification in Riau: Between rationality and policy Utopia. *Forest Science and Technology*, 22(1), 119–130. <https://doi.org/10.1080/21580103.2025.2565629>

- Falsetta, D., & Spilker, B. C. (2026). Psychological reactance theory and tax evasion intentions. *Journal of Business Ethics*, 203(3), 593–610. <https://doi.org/10.1007/s10551-025-06033-6>
- Glasbergen, P. (2018). Smallholders do not eat certificates. *Ecological Economics*, 147, 243–252. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2018.01.023>
- Hair, J. F., Risher, J. J., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2019). When to use and how to report the results of PLS-SEM. *European Business Review*, 31(1), 2–24. <https://doi.org/10.1108/EBR-11-2018-0203>
- Hall, M. (2016). Realising the richness of psychology theory in contingency-based management accounting research. *Management Accounting Research*, 31, 63–74. <https://doi.org/10.1016/j.mar.2015.11.002>
- Hendrawan, D., & Musshoff, O. (2024). Risky for the income, useful for the environment: Predicting farmers' intention to adopt oil palm agroforestry using an extended theory of planned behaviour. *Journal of Cleaner Production*, 475. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.143692>
- Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2015). A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 43(1), 115–135. <https://doi.org/10.1007/s11747-014-0403-8>
- Jelsma, I., Woittiez, L. S., Ollivier, J., & Dharmawan, A. H. (2019). Do wealthy farmers implement better agricultural practices? An assessment of implementation of good agricultural practices among different types of independent oil palm smallholders in Riau, Indonesia. *Agricultural Systems*, 170, 63–76. <https://doi.org/10.1016/j.agsy.2018.11.004>
- Johnstone, L. (2022). The means to substantive performance improvements – environmental management control systems in ISO 14001–certified SMEs. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, 13(5), 1082–1108. <https://doi.org/10.1108/SAMPJ-11-2021-0456>
- Kock, N. (2015). Common Method Bias in PLS-SEM. *International Journal of E-Collaboration*, 11(4), 1–10. <https://doi.org/10.4018/ijec.2015100101>
- Merchant, K. A., & Otley, D. (2020). Beyond the systems versus package debate. *Accounting, Organizations and Society*, 86, 101185. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2020.101185>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025. (2025). Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO). In *Lembaran Negara RI Tahun 2025 No. 24*. (Vol. 24).
- Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Lee, J.-Y., & Podsakoff, N. P. (2003). Common method biases in behavioral research: A critical review of the literature and recommended remedies. *Journal of Applied Psychology*, 88(5), 879–903. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.88.5.879>

- Powers, K. E., & Altman, D. (2023). The psychology of coercion failure: How reactance explains resistance to threats. *American Journal of Political Science*, 67(1), 221–238. <https://doi.org/10.1111/ajps.12711>
- Pramudya, E. P., Wibowo, L. R., Nurfatriani, F., Nawireja, I. K., Kurniasari, D. R., Hutabarat, S., Kadarusman, Y. B., Iswardhani, A. O., & Rafik, R. (2022). Incentives for palm oil smallholders in mandatory certification in Indonesia. *Land*, 11(4). <https://doi.org/10.3390/land11040576>
- Putri, E. I. K., Dharmawan, A. H., Hospes, O., Yulian, B. E., Amalia, R., Mardiyarningsih, D. I., Kinseng, R. A., Tonny, F., Pramudya, E. P., Rahmadian, F., & Suradiredja, D. Y. (2022). The oil palm governance: Challenges of sustainability policy in Indonesia. *Sustainability (Switzerland)*, 14(3). <https://doi.org/10.3390/su14031820>
- Tessier, S., & Otley, D. (2012). A conceptual development of simons' levers of control framework. *Management Accounting Research*, 23(3), 171–185. <https://doi.org/10.1016/j.mar.2012.04.003>
- Watts, J. D., Pasaribu, K., Irawan, S., Tacconi, L., Martanila, H., Wiratama, C. G. W., Musthofa, F. K., Sugiarto, B. S., & Manvi, U. P. (2021). Challenges faced by smallholders in achieving sustainable palm oil certification in Indonesia. *World Development*, 146. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2021.105565>